

Kajian Dampak Kehadiran Pemandokan Dalam Kawasan Pemukiman Ter-hadap Perubahan Sosial Ekonomi. (2011)

Kesimpulan

1. Perubahan sosial telah terjadi di Kelurahan Oesapa dan sekitarnya. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan struktur sosial masyarakat Oesapa, perubahan fungsi sosial dan perubahan hubungan antar sub sistem.
2. Perubahan struktur sosial dapat dilihat dari munculnya ketimpangan sosial, hilangnya kristalisasi kekuasaan, tumbuhnya asosiasi sosial berbasis etnis dan lain-lain. Perubahan fungsi sosial dapat dilacak dari diferensiasi pekerjaan, melemahnya peran ekonomi keluarga, dan diterimanya peran yang diindoktrinasi dari sekolah atau universitas. Perubahan hubungan antar sub sistem dapat dilihat dari hilangnya penguasaan rezim tertentu dalam struktur kekuasaan, berkurangnya peran institusi keluarga, munculnya gejala penguasaan kehidupan privat oleh negara dan modal.
3. Keberadaan pemandokan memberikan banyak implikasi (positif dan negatif) bagi perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya di Oesapa. Implikasi positif kehadiran kos-kosan dan atau pemandokan adalah terbangunnya relasi sosial dan jaringan sosial yang lebih luas pada level masyarakat. Pada bidang ekonomi, keberadaan pemandokan dan dinamika kehadiran mahasiswa memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan mahasiswa tumbuh subur di Oesapa dan sekitarnya.
4. Implikasi negatif kehadiran pemandokan adalah relasi sosial tidak lagi dibangun atas dasar sosial semata, tetapi lebih didominasi oleh struktur ekonomi. Individualisme menjadi gejala umum yang terjadi saat ini di Oesapa dan sekitarnya. Secara sosial, muncul masalah sosial dan kriminalitas, mabuk-mabukan, kumpul kebo, perkelaian antar mahasiswa dan seterusnya oleh para mahasiswa sebagai penghuni pemandokan.
5. Kemunculan berbagai masalah sosial tersebut akhirnya dihubungkan dengan tiga soal utama masalah pemandokan atau kos-kosan di Oesapa dan sekitarnya. Tiga masalah tersebut adalah masalah struktural, kultural dan sosial. Masalah *struktural* berhubungan dengan ketidakjelasan implementasi regulasi mengenai pemandokan/kos-kosan di level pemerintah Kota Kupang dan tekanan modal ke level masyarakat. Masalah *kultural* berhubungan dengan adanya asimilasi dan akulturasi budaya yang diboncengi perilaku yang tidak mendapatkan kontrol masyarakat. Ini pada gilirannya berujung pada level *sosial* dimana masalahnya berkaitan dengan kurangnya fasilitas sosialisasi, rendahnya kontrol sosial masyarakat dan minimnya fasilitas sosial dan kos-kosan atau pemandokan.

Saran/Rekomendasi

1. Pada level struktural, implementasi regulasi (Perda 32 Tahun 1998) dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemandokan yang tidak semata-mata mengatur mengenai penataan bangunan saja, tetapi menjadi sebuah keharusan untuk menjangkau penataan sosial, legalisasi, dan mekanisme keberadaan pemandokan/kos-kosan.
2. Berkaitan dengan rekomendasi pertama di atas, pada level sosial, penyediaan ruang sosialisasi menjadi sebuah keharusan. Selain itu, mekanisme kontrol sosial harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat.
3. Pada level budaya, penanaman nilai budaya dan pertukaran budaya mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman akan nilai budaya yang berbeda.
4. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi juga dipikirkan terutama untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mahasiswa. Kerjasama seperti ini penting dilakukan agar mahasiswa tetap mendapat kontrol dari pihak kampus dan masyarakat termasuk keterlibatan pemerintah manakala terjadi masalah sosial.